



PENGELOLAAN ASET DAERAH UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN

Endayani¹, Suherman Arifin², Malik Fatoni³

^{1,2,3}Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa

Email: endayani@binabangsa.ac.id¹ suherman.arifin@binabangsa.ac.id²

malik.fatoni@binabangsa.ac.id³

Abstrak

Menganalisis pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah daerah Provinsi Banten merupakan tujuan penelitian ini. Dalam upaya meningkatkan pengelolaan aset yang efisien, sering kali mengalami kendala seperti belum lengkapnya inventarisasi dan pendataan aset, maka banyak aset daerah di Banten yang hilang, tidak tercatat, dan tidak terawat dengan baik sehingga tidak dapat digunakan lagi. Sehingga, dibutuhkan pendekatan yang strategis dalam pengelolaan aset atau barang yang dimiliki oleh daerah, yang harus bersifat jelas, efektif, dapat dipertanggungjawabkan, hemat, dan memastikan adanya kepastian dalam nilai manfaat dari barang yang dimiliki daerah tersebut.. Metode penelitian ini mencakup pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen terkait pengelolaan aset. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten sudah berjalan baik dengan merumuskan kebijakan mengenai pemanfaatan aset daerah dan telah dilakukan berbagai upaya strategi pengelolaan aset daerah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten khususnya oleh BPKAD.

Kata kunci: Pengelolaan aset, Efisiensi, Anggaran Pemerintah Daerah

Abstract

Analyzing regional asset management to improve the efficiency of the use of the Banten Provincial Government budget is the purpose of this study. In an effort to improve efficient asset management, it often experiences obstacles such as incomplete inventory and asset data collection, so many regional assets in Banten are lost, unrecorded, and not well maintained so that they can no longer be used. Thus, a strategic approach is needed in managing assets or goods owned by the region, which must be clear, effective, accountable, efficient, and ensure certainty in the value of the benefits of the goods owned by the region. This research method includes data collection through interviews, observations and analysis of documents related to asset management. The results of the analysis show that regional asset management to improve the efficiency of the use of the Banten Provincial Government budget has been running well by formulating policies regarding the use of regional assets and various strategic efforts have been made by the Banten Provincial Government, especially by BPKAD.

Keywords: Asset management, Efficiency, Regional Government Budget

I. PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap wilayah diberikan hak untuk mengelola serta mengatur urusan pemerintahan mereka sendiri, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Ristanti & Handoyo, 2017) Guna aset daerah yang dimiliki setiap wilayah dapat dikelola dengan baik dan efektif oleh pemerintah daerah karena lebih mengetahui kekurangan maupun kelebihan serta kondisi spesifik daerahnya. (Dewantara et al., 2023). Aset milik pemerintah daerah merupakan salah

satu bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah, yang memberikan gambaran mengenai potensi ekonomi dan situasi kekayaan pemerintah daerah.. (Utami et al., 2019) Sehingga, aset milik pemerintah daerah perlu dikelola dengan efektif melalui perencanaan, pengaturan, pengarahan, dan pengawasan yang penting.. (Zamdedy, 2024).

Melalui pengelolaan aset yang tepat dan efektif, efisiensi dalam anggaran dapat ditingkatkan dengan menjamin bahwa aset daerah dimanfaatkan secara optimal serta memberikan keuntungan yang maksimal bagi masyarakat. Efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya menunjukkan bahwa penggunaannya harus diperkecil, sementara hasil yang diperoleh harus diperbesar dalam konteks pencapaian yang sesuai dengan tujuan. (Rampengan et al., 2016). Anggaran pemerintah daerah adalah pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah yang digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat (Susanti, 2014). Namun dalam proses pengelolaan aset daerah sering kali terdapat berbagai persoalan daerah. (Hartanto, 2019). Secara khusus Pemerintah Provinsi Banten telah menyatakan bahwa akibat dari belum lengkapnya inventarisasi dan pendataan aset, maka banyak aset daerah di Banten yang hilang, tidak tercatat, dan tidak terawat dengan baik sehingga tidak dapat digunakan lagi; Tidak hanya itu, legalitasnya, tetapi kendaraan tersebut merupakan kendaraan dinas yang sudah habis masa manfaatnya. Nilai kendaraan yang disewa telah kedaluwarsa, beberapa di antaranya tidak dikembalikan dan tidak dapat dilacak.. (Sanjaya & Jumanah, 2020).

Secara umum permasalahan aset Pemerintah Provinsi Banten terkait dengan perencanaan dan penganggaran aset daerah, dimana perencanaan aset belum direncanakan secara optimal sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap pemanfaatan barang yang dibeli. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan pada penelitian ini adalah “Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah daerah Provinsi Banten?”. Pengelolaan aset negara menurut definisi yang ada dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus berpikir lebih progresif dalam mengelola aset negara atau daerah, terutama dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan aset tersebut. (Nuryamin, 2015). Maka, ruang lingkup pengelolaan aset negara melibatkan perencanaan kebutuhan dan anggaran; pengadaan; pemanfaatan; penggunaan; perlindungan dan perawatan; penilaian; penghapusan; pemindahan hak; pencatatan; serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses ini merupakan siklus logistik yang lebih rinci yang didasari oleh pertimbangan kebutuhan untuk menyesuaikan siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan Negara). (Aira, 2014). Konsep

efisiensi berhubungan dengan produktivitas. Efisiensi dinilai dengan mengaitkan hasil yang didapatkan dengan aset yang digunakan (biaya hasil). Suatu prosedur operasional dianggap optimal jika suatu produk atau sumber daya tertentu dapat dihasilkan dengan pemanfaatan sumber daya dan alat yang paling sedikit (pengeluaran yang efektif). (Friedkin C. dan Zazak A, 2013)

Anggaran adalah rencana yang mendetail untuk mendapatkan serta memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya dalam kurun waktu tertentu. Anggaran adalah perencanaan keuangan yang diatur secara regular yang disusun sesuai dengan program yang telah disetujui. (Asiva Noor Rachmayani, 2015). Konsep Anggaran Pemerintah Daerah Mardiasmo (2004) menegaskan bahwa “Sistem akuntabilitas keuangan suatu institusi akan berjalan efektif jika terdapat sistem pengawasan keuangan yang optimal. Ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki posisi penting dalam pelaksanaan pemerintahan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, biaya yang sebenarnya dikeluarkan tidak boleh melebihi batas anggaran yang telah ditentukan. (Nasution, 2019)

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang bagaimana pengelolaan aset daerah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten dan bagaimana hal tersebut berdampak terhadap efisiensi penggunaan anggaran daerah. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian lebih menekankan pada proses, kebijakan, dan praktik yang diterapkan dalam pengelolaan aset. Penelitian dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung dari bulan Januari sampai Maret tahun 2025. Sumber Data Primer: Diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci seperti pejabat BPKAD, pengelola aset di OPD, dan pihak auditor internal. Data Sekunder: Berupa dokumen-dokumen kebijakan, laporan pengelolaan aset daerah, laporan audit BPK, laporan keuangan daerah, serta literatur terkait pengelolaan aset dan efisiensi anggaran. Teknik Pengumpulan Data Wawancara Dilakukan secara semi-terstruktur untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai kebijakan dan praktik pengelolaan aset. Observasi Mengamati secara langsung sistem pengelolaan aset dan prosedur

administrasinya. Studi Dokumentasi Menganalisis berbagai dokumen yang relevan dengan pengelolaan aset dan laporan anggaran.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik kepada masyarakat, aset daerah harus dikelola secara baik dan benar agar dapat mencapai hasil yang maksimal (Maulidiah, 2020). Untuk mengelola aset secara baik dan akurat, pemerintah daerah harus menerapkan asas-asas berikut:

a. Asas Fungsional

Proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah di bidang pengelolaan barang/kekayaan daerah, yang dilakukan oleh unsur kewenangan pengguna, pelaksana, pengelola dan kepada daerah harus mematuhi fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing elemen ini.

b. Asas Kepastian Hukum

Proses pengelolaan kekayaan/barang milik daerah yang wajib dilaksanakan dan dikelola berdasarkan peraturan yang berlaku.

c. Asas Transparansi

Proses penyelenggaraan pengelolaan kekayaan/barang milik daerah yang bersifat terbuka serta memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk memperolehnya dan mengenai hak-hak informasinya akurat.

d. Asas Efisiensi

Proses pengelolaan aset/barang daerah untuk memastikan bahwa aset daerah digunakan sesuai dengan persyaratan yang seragam dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penting nasional.

e. Asas Akuntabilitas

Bahwa setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan aset/harta milik masyarakat pada prinsipnya harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat.

1. Manajemen Aset Provinsi Banten

Manajemen aset daerah adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola barang milik daerah (BMD) dengan mematuhi prinsip-prinsip manajemen aset yang mendasar. Dalam proses ini, pengelolaan harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Undang-undang, kebijakan Pemerintah, keputusan dari Presiden, keputusan Menteri, serta dokumen keputusan

lain yang berkaitan dengan regulasi dan pengelolaan aset daerah. Fungsi-fungsi manajemen mencakup Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, dan Pengendalian. (ArjiHarahap, 2000)

a. Perencanaan (*planning*)

Di Provinsi Banten, penetapan kebutuhan barang atau aset harus mengikuti daftar yang telah disiapkan oleh setiap unit organisasi. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebagai pengguna barang, bertugas merencanakan dan merumuskan kebutuhan barang dalam rencana kerja dan anggaran untuk satuan kerja perangkat daerah sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Kepala Bidang Aset, yang bertanggung jawab dalam perencanaan pengadaan barang atau aset, memiliki tanggung jawab untuk melakukan koordinasi serta kerjasama dengan setiap SKPD mengenai pengadaan dan perencanaan kebutuhan barang.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan aktivitas yang melibatkan perancangan dan penataan hubungan kerja di antara individu-individu agar tercapai suatu kesatuan yang fokus pada mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan yang berfungsi mengintegrasikan semua sumber daya untuk menciptakan kekuatan baru demi mencapai target. (Angelya et al., 2022)

Pengelolaan aset di Provinsi Banten telah dilakukan dengan baik. Struktur organisasi, sistem, serta keadaan organisasi BPKAD (Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) sudah mengoptimalkan untuk pengelolaan aset daerah di Provinsi Banten. Semua kebutuhan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang telah diwakili dalam struktur organisasi tersebut.

c. Pengarahan (*actuating*)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, telah berlangsung kegiatan pengarahannya yang diberikan oleh pimpinan kepada staf untuk menjalankan tanggung jawab mereka dalam mengelola aset.

d. Pengendalian (*controlling*)

Pengendalian adalah sejumlah langkah, prosedur, dan cara yang diterapkan oleh pimpinan untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi sejalan dengan rencana, sasaran, dan standar yang telah ditentukan. (Fauzan, 2024)

Pengelolaan aset tanah kepemilikan Provinsi Banten telah dilaksanakan melalui proses pencatatan di dalam buku dan kartu, termasuk Kartu Inventaris Barang, Kartu Inventaris Ruangan, Buku Inventaris, serta Buku Induk Inventaris.

2. Strategi Pengelolaan Aset

Pengelolaan aset adalah salah satu elemen krusial untuk memelihara keberlangsungan dan ekspansi ekonomi suatu wilayah. Provinsi Banten, juga memiliki sumber daya yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini, kita akan mengulas berbagai cara dan strategi yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan sumber daya di Provinsi Banten. (Asiva Noor Rachmayani, 2015)

a. Inventarisasi dan Pemetaan Aset

Tahap awal dalam memperbaiki pemanfaatan aset ialah melaksanakan pencatatan dan pemetaan terhadap aset yang ada di Provinsi Banten. Ini termasuk pengenalan semua jenis properti, lahan, gedung, infrastruktur, kendaraan, serta sumber daya lain yang dimiliki oleh pemerintah provinsi. Dengan melaksanakan pemetaan yang menyeluruh, pemerintah provinsi dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai aset yang tersedia dan kemungkinan penggunaannya.

b. Evaluasi Kondisi dan Nilai Aset

Setelah proses inventarisasi selesai, langkah selanjutnya yaitu mengevaluasi keadaan dan nilai dari aset. Pemerintah daerah perlu memeriksa keadaan fisik, perawatan, serta fungsi dari aset-aset tersebut. Dalam konteks ini, pemetaan aset daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi terbaru seperti drone atau pemetaan digital bisa memberikan informasi yang tepat dan mendalam. Penilaian terhadap nilai aset juga sangat krusial untuk mengidentifikasi potensi pendapatan atau nilai investasi yang dapat dihasilkan dari aset daerah tertentu.

c. Pengelolaan Aset yang Efisien

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pengelolaan aset dilakukan dengan cara yang efektif dan terbuka. Ini termasuk merumuskan kebijakan pengelolaan aset, membentuk tim khusus yang berkewajiban untuk pengelolaan aset, serta menerapkan sistem terpadu untuk pemantauan dan penilaian properti. Tidak hanya itu, pemerintah daerah pula harus memikirkan tentang revisi peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan aset untuk menjamin kepatuhan dan tanggung jawab yang sesuai.

d. Penggunaan Teknologi dan Inovasi

Pemakaian teknologi dan inovasi juga dapat mendukung pemaksimalan aset di Provinsi Banten. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang modern mampu membantu dalam pengawasan dan pengelolaan aset secara efektif. Contohnya, sistem manajemen aset berbasis digital bisa digunakan untuk menyatukan data aset,

mengawasi pemeliharaan berkala, dan mengoptimalkan pemanfaatan aset secara langsung.

e. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat

Masyarakat juga memiliki kemampuan untuk berkontribusi signifikan dalam pengelolaan aset di Provinsi Banten. Pemerintah daerah dapat mengikutsertakan masyarakat dalam memanfaatkan dan perawatan aset melalui inisiatif partisipatif. Contohnya, dengan adanya program pengelolaan ekosistem atau pengembangan masyarakat, warga dapat berpartisipasi dalam perawatan serta penggunaan infrastruktur publik.

f. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan

Dalam memaksimalkan aset, sangat penting untuk memperhatikan aspek lingkungan. Wilayah Banten yang kaya akan sumber daya alam, termasuk laut, hutan, dan sumber daya alam lain. Pemerintah daerah harus menjamin bahwa pengelolaan aset dilakukan dengan cara yang berkelanjutan, dengan fokus pada perlindungan lingkungan, konservasi ekosistem, dan keberlanjutan sumber daya alam.

g. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Pengoptimalan aset di Provinsi Banten tidak hanya merupakan langkah tunggal, melainkan harus dianggap sebagai suatu proses yang berkelanjutan. Penilaian rutin terhadap manajemen aset perlu dilakukan untuk memastikan keefektifan strategi serta menemukan kemungkinan area yang memerlukan perbaikan. Dengan cara ini, pemerintah provinsi dapat terus meningkatkan kinerja pengelolaan aset dan memaksimalkan keuntungan yang didapat dari aset tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah daerah Provinsi Banten secara umum telah berjalan baik dengan merumuskan kebijakan mengenai pemanfaatan aset daerah dan telah dilakukan berbagai upaya strategi pengelolaan aset daerah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten khususnya oleh Bapenda dan BPKAD. Oleh karena itu, pengelolaan aset bukan sekadar cara untuk mengatasi masalah yang ada, melainkan juga merupakan langkah penting dalam pembaruan pengelolaan aset di tingkat pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Aira, A. (2014). The Role of Asset Management in Regional Development. *Journal of*

- Religious Social Research, Vol.17, 21–39.
- Angelya, A. A., Nurmalasari, Enggin Rios Saputra, Naziha Amani, Sukatin, & Mashudi Hariyanto. (2022). Pengorganisasian Dalam Manajemen Pendidikan. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 97–105. <https://doi.org/10.55606/jurima.v2i3.856>
- ArjiHarahap, S. (2000). Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi-Fungsi Manajemen. *Journal of Visual Languages & Computing*, 11(3), 287–301.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Analisis struktur kovarians indikator terkait kesehatan pada lansia yang tinggal di rumah, dengan fokus pada rasa subjektif terhadap kesehatan*. 6.
- Dewantara, D. A., Anwary, I., & Buana, M. S. (2023). Optimalisasi Aset Bangunan Daerah Sebagai Upaya Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekaligus Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah. *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 1776–1729.
- Fauzan. (2024). *Sistem Pengendalian Manajemen Indigo Media* (Vol. 1, Issue 36). www.pustakaindigo.com
- Friedkin C. dan Zazak A. (2013). *Survei pasar setengah tahunan*. 11, 87–102.
- Hartanto, N. (2019). Pelaksanaan Pp. No. 27 Tahun 2014 Mengenai Pengelolaan Aset Negara/Daerah Dalam Usaha Meningkatkan Efektivitas Manajemen Barang Dan Layanan. *Jurnal Tinjauan Manajemen*, 2(3), 223. <https://doi.org/10.25157/jmr.v2i3.1799>
- Maulidiah, S. (2020). Peningkatan Pengelolaan Aset Sebagai Bentuk Perubahan Birokrasi Di Wilayah. *Jurnal Manajemen, Politik Dan Birokrasi*, 3(1), 233–242.
- Nasution, D. A. D. (2019). Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 149–162.
- Nuryamin, S. (2015). Pengelolaan Aset atau Barang Milik Daerah Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015. *Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Aset, 20120520145*, 1–20.
- Rampengan, M., Nangoi, G. B., & Manossoh, H. (2016). Evaluation of the Effectiveness and Efficiency in the Implementation of the Budget Expenditures of the Regional Development Planning Agency (Bappeda) in Manado City. *Journal of Scientific Efficiency*, 16(3), 616–623. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13530>
- Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). The Law on Regional Autonomy and Local Economic Development. *Journal of Financial Accounting Research*, 2(2), 115–122.
- Sanjaya, N., & Jumanah. (2020). Usaha Meningkatkan Sektor Pertanian Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah (BMD) di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten pada Anggaran Tahun 2018. *Jurnal Administrasi Publik dan Studi Pemerintahan Indonesia (JIPAGS)*, 2(2), 391–411.
- Susanti, E. (2014). Analisis Mengenai Pengeluaran Modal dalam Anggaran Pemerintah Daerah Terkait dengan Pengeluaran Pemeliharaan serta Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 4(1), 1–25. <https://doi.org/10.37598/jam.v4i1.291>
- Utami, R. R., Aliamin, A., & Fahlevi, H. (2019). Evaluation of Local Asset Management in the Local Government of Aceh Tengah District. *Perspective Journal of Darussalam Economics*, 5(2), 124–140. <https://doi.org/10.24815/jped.v5i2.15662>
- Zamdedy, Z. (2024). Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah. *Syntax Idea*, 6(4), 1545–1553. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i4.3152>